



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja (Renja) Perubahan OPD Tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakkan **stakeholders** terhadap Kota Pangkal Pinang.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 di susun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 Kota Pangkal Pinang

Atas tersusunnya Renja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pangkal Pinang, Mei 2025

KEPALA BADAN,

DR. MUHAMMAD YASIN, S.E, M.M

PEMBINA TK 1 / IV B

NIP. 197311222002121006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja (RENJA Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA Perubahan dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja (RENJA) OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

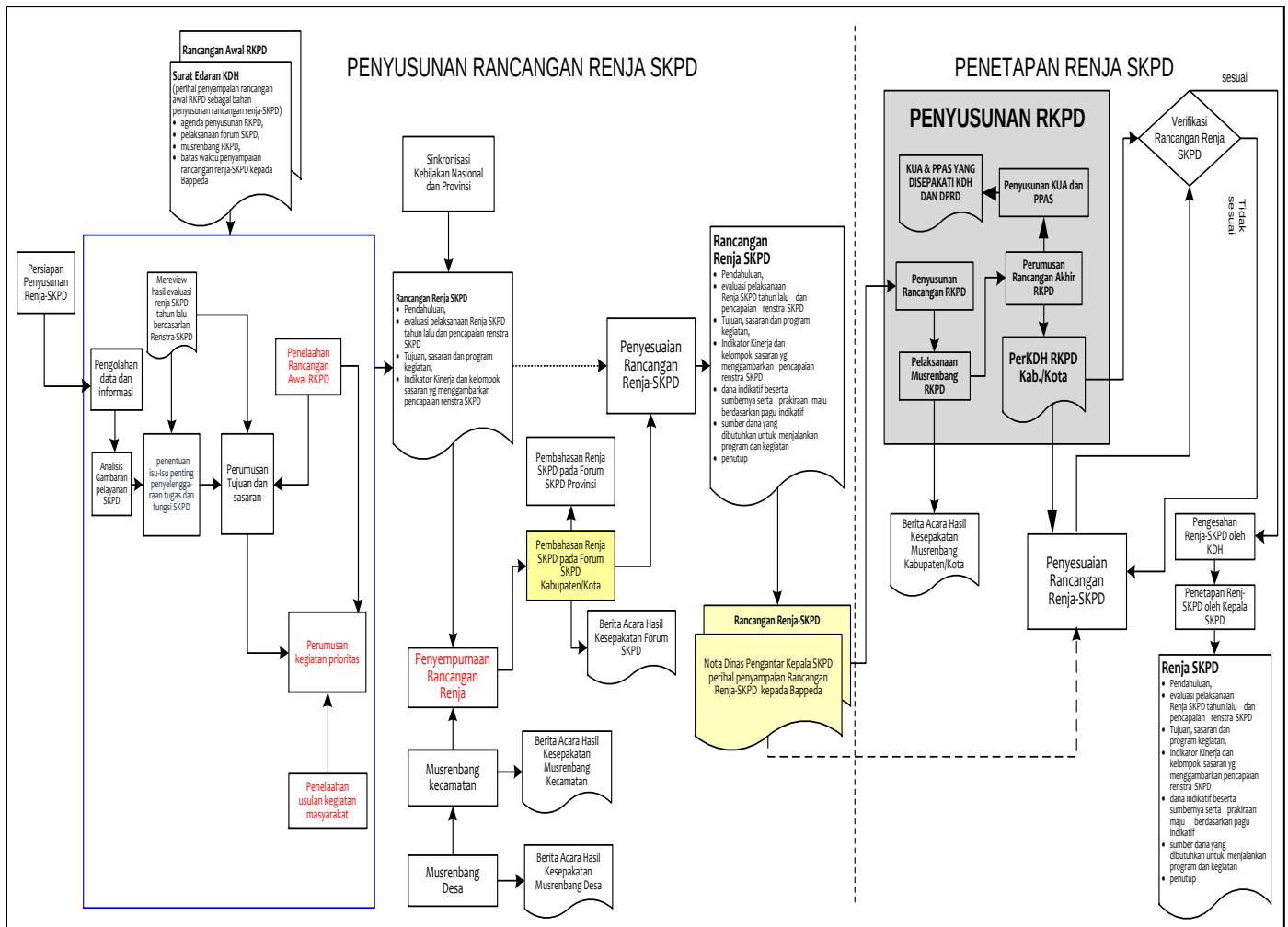
Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Berpedoman kepada Perubahan RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawa

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
14. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2022 Nomor 34, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (12.75/2022));
21. Peraturan Daerah Kota Pangkal inang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 3 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (1.3/2019))
22. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita
23. Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 No. 183)
Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 No. 277)

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perencanaan kinerja (Renja) Perubahan tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang disusun dengan sistematika, sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025 berisi :

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.3. Isu-isu Rencana Penyelenggaraan Tupoksi OPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

berisi:

- 1.1. Tujuan dan Sasaran OPD
- 1.2. Program dan Kegiatan OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

BAB. V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TIWULAN I TAHUN 2025
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang melaksanakan 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 71 sub kegiatan dengan besaran anggaran sebesar Rp 58.458.848.684 dengan realisasi anggaran sebesar 7.476.986.202, terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan, 19 sub kegiatan
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan, 6 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan , 12 sub kegiatan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 8 kegiatan, 34 sub kegiatan

No.	Program 2025 (APBD)	Anggaran 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2025 (Rp)	%
01.00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	12.667.665.691	279.287.108	57,06
02.00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	793.603.744	121.200.624	74,31
03.00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.239.135.104	730.384.392	86,98
04.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	39.758.444.145	6.346.114.078	92,78
JUMLAH		58.458.848.684	7.476.986.202	12,79

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

TRIWULAN I
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

N o	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2025								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	
1	-	050201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75	39.758.444.145	75	6.346.114.078		0		0		0	75	6.346.114.078	100	16	Sekretariat
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	78									0		0		Sekretariat	
5		050201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	36.552.271.225	25	6.026.650.306		0		0		0	25	6.026.650.306	25	16	Sekretaris
6		050201202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	76	36.482.727.833	76	6.013.393.074							76	6.013.393.074	100	16	Sub Bagian Keuangan
7		050201202002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	12	69.543.392	3	13.257.232							3	13.257.232	25	19	Sub Bagian Keuangan
11		050201203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Ditata dan Diinventarisir (Dengan Satuan:%)	100	48.543.392	25	5.378.616		0		0		0	25	5.378.616	25	11	Sekretaris

12		050201203006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	12	48.543.392	3	5.378.616							3	5.378.616	25	11	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
13		050201205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0,3	130.358.480	0	25.893.080		0		0		0	0	25.893.080	100	20	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14		050201205003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan: Dokumen)	12	130.358.480	3	25.893.080							3	25.893.080	25	20	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16		050201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.304.551.392	25	76.048.106		0		0		0	25	76.048.106	25	6	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
17		050201206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	18.277.500									0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
19		050201206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	2.555.000									0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20		050201206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	3	489.271.500	3	2.120.000							3	2.120.000	100	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
21		050201206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)	1	139.975.000									0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22		050201206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan: Laporan)	40	400.000.000	10	63.170.874							10	63.170.874	25	16	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

23		050201206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan: Dokumen)	12	254.472.392	3	10.757.232							3	10.757.232	25	4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
24		050201207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	25.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
26		050201207010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	25.000.000								0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
27		050201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.375.328.960	25	197.791.824	0	0	0	0	25	197.791.824	25	14	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
28		050201208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan: Laporan)	12	42.543.392	3	8.757.232						3	8.757.232	25	21	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
29		050201208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	12	685.608.000	3	70.819.192						3	70.819.192	25	10	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
30		050201208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	4	82.656.864								0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
31		050201208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan: Laporan)	2	564.520.704	2	118.215.400						2	118.215.400	100	21	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

32		050201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	100	322.390.696	25	14.352.146		0		0		0	25	14.352.146	25	4	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
33		050201209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan: Unit)	1	57.261.696	1	6.888.616							1	6.888.616	100	12	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
34		050201209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan: Unit)	65	29.500.000	65	5.463.530							65	5.463.530	100	19	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
35		050201209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	1	151.129.000									0	0	0	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
36		050201209010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan: Unit)	8	84.500.000	2	2.000.000							2	2.000.000	25	2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	50,000	15,962	
PREDIKAT KINERJA																			
37		050202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Dengan Satuan:%)	100	12.667.665.691	25	279.287.108		0		0		0	25	279.287.108	25	2	Bidang Perbendaharaan
				Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (Dengan Satuan:%)	30									0			0		Bidang Akuntansi dan Pelaporan

38		050202201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	1.227.393.376	25	159.707.046		0		0		0	25	159.707.046	25	13	Kepala Bidang Anggaran
39		050202201001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan: Dokumen)	1	102.250.000								0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
40		050202201002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan: Dokumen)	1	160.765.000								0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
41		050202201003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan: Dokumen)	33	83.170.000								0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
42		050202201004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	33	71.500.000								0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
43		050202201005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan: Dokumen)	33	74.900.000	33	13.815.150						33	13.815.150	100	18	18	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
44		050202201006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dengan Satuan: Dokumen)	33	18.900.000								0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
45		050202201007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dengan Satuan: Dokumen)	1	208.625.000	1	12.253.000						1	12.253.000	100	6	6	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
46		050202201008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	194.450.000								0	0	0	0	0	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran

47		050202201009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	3	312.833.376	3	133.638.896							3	133.638.896	100	43	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
48		050202202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	242.946.864	25	42.612.528		0		0		0	25	42.612.528	25	18	Kepala Bidang Perbendaharaan
49		050202202001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	12	42.543.392	3	8.757.232							3	8.757.232	25	21	Kepala Bidang Perbendaharaan
50		050202202003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dengan Satuan:Dokumen)	8	27.271.696	2	5.378.616							2	5.378.616	25	20	Kepala Bidang Perbendaharaan
51		050202202009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dengan Satuan: Dokumen)	12	173.131.776	3	28.476.680							3	28.476.680	25	16	Kepala Bidang Perbendaharaan
52		050202203	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	429.139.522	25	53.655.296		0		0		0	25	53.655.296	25	13	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
53		050202203003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan: Laporan)	3	119.421.742	3	8.962.216							3	8.962.216	100	8	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

54		050202203004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	1	9.589.300								0	0	0	0	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
55		050202203005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Dokumen)	2	265.478.480	2	44.693.080						2	44.693.080	100	17	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
56		050202203009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	1	34.650.000								0	0	0	0	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
57		050202204	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	10.618.185.929	10	9.085.652		0	0	0	0	10	9.085.652	10	0	Kepala Bidang Anggaran
58		050202204009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan: Laporan)	1	10.618.185.929	1	9.085.652						1	9.085.652	100	0	Kepala Bidang Anggaran
59		050202205	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Data dan SIPD Lingkup Keuangan Daerah yang dapat Diakses (Dengan Satuan:%)	100	150.000.000	25	14.226.586		0	0	0	0	25	14.226.586	25	9	Kepala Bidang Anggaran

60		050202205002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	1	150.000.000	1	14.226.586							1	14.226.586	100	9	Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah
61		050202205003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1	0													Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	12,500	2,205	
PREDIKAT KINERJA																			
62	-	050203	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD (Dengan Satuan:%)	100	793.603.744	25	121.200.624		0		0		0	25	121.200.624	25	15	Bidang Aset
63		050203201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	793.603.744	25	121.200.624		0		0		0	25	121.200.624	25	15	Kepala Bidang Aset
64		050203201006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	34	41.000.000	34							34	0	100	0	Kepala Bidang Aset	
65		050203201007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	250	276.358.480	250	70.693.080						250	70.693.080	100	26	Kepala Bidang Aset	
66		050203201008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	1	75.000.000	1	3.600.000						1	3.600.000	100	5	Kepala Bidang Anggaran	

67		050203201010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	20	152.086.784	20	19.514.464							20	19.514.464	100	13	Kepala Bidang Aset	
68		050203201011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	34	172.658.480	34	27.393.080							34	27.393.080	100	16	Kepala Bidang Aset	
69		050203201013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	200	76.500.000									0	0	0	0	Kepala Bidang Aset	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		25,000	15,272	
PREDIKAT KINERJA																				
70	-	050204	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian penagihan pajak daerah (Dengan Satuan:%)	5	5.239.135.104	1	730.384.392		0		0		0	1	730384392	20	14	Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	
71		050204201	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Pajak Daerah yang Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	5.239.135.104	25	730.384.392		0		0		0	25	730.384.392	25	14	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	
				Persentase nilai pajak daerah tertagih (Dengan Satuan:%)	100		25							25			25		Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	
72		050204201002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	1	675.180.512	1	114.194.504							1	114.194.504	100	17	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	

73		050204201003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	1	481.815.088		16.135.848						0	16.135.848	0	3	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
74		050204201004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan: Unit)	1	72.000.000								0	0	0	0	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
75		050204201005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	1	580.750.000	1	25.500.000						1	25.500.000	100	4	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
76		050204201006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	192.543.392	1	5.378.616						1	5.378.616	100	3	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
77		050204201007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Dengan Satuan:Obyek Pajak)	69.000	246.560.000	17.250	72.375.000						17250	72.375.000	25	29	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
78		050204201008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	74.500	27.271.696								0	0	0	0	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
79		050204201009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Dengan Satuan:Layanan)	10	11.200.000								0	0	0	0	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
80		050204201011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	52.963	927.750.608	10.000	102.655.920						10.000	102.655.920	19	11	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah
81		050204201012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	40	3.000.000								0	0	0	0	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah

82		050204201013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	10	2.001.063.808	2	394.144.504							2	394.144.504	20	20	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	
83		050204201014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan: Laporan)	3	20.000.000									0	0	0	0	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		20,000	13,941	
PREDIKAT KINERJA																				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																		26,875	11,845	
PREDIKAT KINERJA																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:																				
Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 07-02-2025 KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG MUHAMMAD YASIN, S.E., M.M. NIP.197311222002121006																				

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang.

Badan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Keuangan Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan program dan kegiatan pada suatu instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 No. 183) menjelaskan bahwa Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. penetapan rencana strategis Badan Keuangan Daerah untuk mendukung visi dan misi dan kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkalpinang bidang keuangan daerah;
- d. penetapan rencana kerja Badan Keuangan Daerah menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan daerah;
- f. pelaksanaan perencanaan bidang keuangan daerah;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan keuangan lingkup kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Badan Keuangan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang dipetakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Masih ada keterlambatan penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah
		Adanya perubahan Petugas di Perangkat Daerah
	belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang	belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terkait pelayanan pajak daerah bagi public
		belum optimalnya kajian dan analisis terkait penetapan potensi pajak daerah

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) , yang sudah diperoleh sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang maka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Keuangan Daerah , namun perlu adanya sinergi dari seluruh Perangkat Daerah. Sampai saat ini terdapat permasalahan yaitu masih ada keterlambatan dari beberapa Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan dan aset sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Badan Keuangan Daerah sehingga mengurangi kesempurnaan tersebut, walaupun LKPD disampaikan tepat waktu pada akhirnya. Keterlambatan tersebut

dikarenakan pergantian petugas di tiap Perangkat Daerah dan tentunya ini bukan wewenang dari Badan Keuangan Daerah .

Dan belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkal Pinang dikarenakan masih adanya akar masalah berkenaan, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terkait pelayanan pajak publik, adanya beberapa keluhan yang disampaikan terkait pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan beberapa pajak daerah lainnya, termasuk sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum optimal. Terkait belum optimalnya kajian dan analisis terkait penetapan potensi pajak daerah juga menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang diinginkan di masa mendatang, sedangkan tujuan RPD 2024 - 2026 Kota Pangkalpinang adalah ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance ”*** hal ini ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang adalah sebagai berikut : ***“Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah”***

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dalam RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut ***“ Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ”*** sedangkan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang untuk sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah

Tabel III.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<i>Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah</i>		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
		1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah	100 %	100 %	100 %
		2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	17 %	18 %	19 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Utama	Target 2025
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah	100 %
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	18 %

Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang. Pemerintah dan unsur penunjang keuangan logika pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan suatu peta strategis yang menggambarkan kaitan sebab akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal.

Pada dasarnya, seluruh kaitan sebab akibat antar indikator kinerja ini sama dengan hubungan sebab akibat yang sudah diasumsikan terjadi pada tujuan dan program sebagaimana digambarkan pada bagian terdahulu. Jadi seluruh indikator kinerja kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan dianggap faktor yang berperan dalam mencapai kinerja pada enam persepektif diatas. Indikator kegiatan persepektif peningkatan proses internal pun diasumsikan akan menyumbang bagi pencapaian hasil kegiatan-kegiatan pada persepektif di atas.

Peta strategi dan indikator kinerja kunci tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang dianggap perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan keunikan permasalahan dimasing-masing tempat

4.2. Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Anggaran Perubahan Tahun 2025 secara keseluruhan adalah 4 program, 15 kegiatan, dan 71 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif tercantum pada tabel dibawah ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
					BADAN KEUANGAN DAERAH				49.453.277.671,00	58.458.848.684,00	48.407.697.230,40							49.366.276.755,00					
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				49.453.277.671,00	58.458.848.684,00	48.407.697.230,40							49.366.276.755,00					
	5	02			KEUANGAN				49.453.277.671,00	58.458.848.684,00	48.407.697.230,40							49.366.276.755,00					
1	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah			75 78 Nilai Nilai	75 78 Nilai Nilai	39.709.459.797,00	39.758.444.145,00	39.688.370.713,40					39.709.459.797,00					
	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-		100%	100%	1.800.000,00	0,00	0,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	1.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH			
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH			

5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat sesuai SAP	-			100 %	100 %	35.430.595.797,00	36.552.271.225,00	36.552.271.225,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		35.430.595.797,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	35.408.020.797,00	36.482.727.833,00	36.689.088.941,40	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			35.408.020.797,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00	69.543.392,00	69.543.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.905.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.905.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.905.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.905.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	14.515.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			14.515.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Ditata dan Diinventarisir	-			100 %	100 %	3.700.000,00	48.543.392,00	48.543.392,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		3.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.700.000,00	48.543.392,00	48.543.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			3.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	-			0,3 %	0,3 %	139.600.000,00	130.358.480,00	130.358.480,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		139.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	136.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			136.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	130.358.480,00	130.358.480,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			3.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	1.529.103.000,00	1.304.551.392,00	1.304.551.392,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.529.103.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.287.500,00	18.277.500,00	9.127.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			20.287.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			74.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5	02	01	2.06	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
				03		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.805.000,00	2.555.000,00	2.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.805.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
				04		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	680.165.500,00	489.271.500,00	471.521.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			680.165.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
				05		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	138.845.000,00	139.975.000,00	89.975.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			138.845.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
				09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	350.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.06	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
				10		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	263.000.000,00	254.472.392,00	138.172.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			263.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.07	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
				02		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.07	00	Pengadaan Mebel																	
				05		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.07	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
				10		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	25.000.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.641.000.000,00	1.375.328.960,00	1.375.328.960,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		1.641.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	42.543.392,00	42.543.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	663.000.000,00	685.608.000,00	651.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			663.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	86.500.000,00	82.656.864,00	82.656.864,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			86.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	891.500.000,00	564.520.704,00	570.449.164,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			891.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	-			100 %	100 %	863.661.000,00	322.390.696,00	322.390.696,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		863.661.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.000.000,00	57.261.696,00	57.261.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			37.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 Unit	65 Unit	527.550.000,00	29.500.000,00	100.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			527.550.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.950.000,00	151.129.000,00	151.129.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			199.950.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	99.161.000,00	84.500.000,00	84.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			99.161.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	

2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan				100 30 % %	100 30 % %	7.025.524.500,00	12.667.665.691,00	2.789.587.669,00									6.795.498.584,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tepat Waktu	-			100 %	100 %	1.342.673.000,00	1.227.393.376,00	1.227.393.376,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-				1.023.582.084,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5	02	02	2.01	00 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	101.630.000,00	102.250.000,00	91.310.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				101.718.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.01	00 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	72.130.000,00	160.765.000,00	147.410.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				72.130.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.01	00 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen	33 Dokumen	232.557.100,00	83.170.000,00	75.350.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				232.557.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.01	00 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
							Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen	33 Dokumen	87.099.500,00	71.500.000,00	66.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				87.099.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.01	00 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
							Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen	33 Dokumen	81.470.700,00	74.900.000,00	74.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				81.470.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.01	00 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
							Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi				33 Dokumen	33 Dokumen	29.270.700,00	18.900.000,00	10.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				29.270.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.01	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	205.442.500,00	208.625.000,00	171.700.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				205.442.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	5	02	02	2.01	00 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	171.272.500,00	194.450.000,00	158.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah				102.812.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	

5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					3 Dokumen	3 Dokumen	361.800.000,00	312.833.376,00	312.833.376,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			111.081.084,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Tepat Waktu	-				100 %	100 %	245.336.000,00	242.946.864,00	242.946.864,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		245.336.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen	71.180.000,00	42.543.392,00	42.543.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			71.180.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					8 Dokumen	8 Dokumen	87.192.000,00	27.271.696,00	27.271.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			87.192.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					12 Dokumen	12 Dokumen	86.964.000,00	173.131.776,00	173.131.776,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			86.964.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	-				100 %	100 %	402.515.500,00	429.139.522,00	429.139.522,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		402.520.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					3 Laporan	3 Laporan	62.056.000,00	119.421.742,00	109.421.742,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			62.056.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					1 Laporan	1 Laporan	22.391.000,00	9.589.300,00	9.589.300,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			22.396.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2 Dokumen	2 Dokumen	256.378.500,00	265.478.480,00	217.335.400,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			256.378.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5	02	02	2.03	00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																	
				09		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	61.690.000,00	34.650.000,00	27.790.987,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			61.690.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 %	100 %	5.000.000.000,00	10.618.185.929,00	10.618.185.929,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.04	00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																	
				09		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000.000,00	10.618.185.929,00	1.000.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Data dan SIPD Lingkup Keuangan Daerah yang Dapat Diakses	-			100 %	100 %	35.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		124.060.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.05	00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																	
				02		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			75.610.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	02	2.05	00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
				03		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			48.450.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Manajemen aset/ BMD				100 %	100 %	750.268.209,00	793.603.744,00	746.603.744,00							741.598.209,00	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	-			100 %	100 %	750.268.209,00	793.603.744,00	793.603.744,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		741.598.209,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	2.01	00	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	
				06		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				34 Laporan	34 Laporan	164.062.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			164.062.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	2.01	00	Pengamanan Barang Milik Daerah																	
				07		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				250 Laporan	250 Laporan	218.487.009,00	276.358.480,00	276.358.480,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			209.817.009,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	2.01	00	Penilaian Barang Milik Daerah																	
				08		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	79.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			79.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5	02	03	2.01	00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	
				10		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	112.659.200,00	152.086.784,00	152.086.784,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			112.659.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	2.01	00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
				11		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				34 Laporan	34 Laporan	84.660.000,00	172.658.480,00	172.658.480,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			84.660.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	03	2.01	00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
				13		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	91.400.000,00	76.500.000,00	29.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			91.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Capaian Penagihan Pajak Daerah				5 %	5 %	1.968.025.165,00	5.239.135.104,00	5.183.135.104,00							2.119.720.165,00	
	5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Pajak Daerah yang Tepat Waktu Persentase Nilai Pajak Daerah yang Tertagih	-			100 %	100 %	1.968.025.165,00	5.239.135.104,00	5.239.135.104,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.119.720.165,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																	
				02		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	48.250.000,00	675.180.512,00	675.180.512,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			48.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	00	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																	
				03		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	243.400.000,00	481.815.088,00	481.815.088,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			243.400.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
				04		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Unit	1 Unit	90.250.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			92.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																	
				05		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	408.750.000,00	580.750.000,00	430.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			408.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					1 Laporan	1 Laporan	215.600.000,00	192.543.392,00	192.543.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			215.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
						Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya					69000 Obyek Pajak	69000 Obyek Pajak	227.349.165,00	246.560.000,00	246.560.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			227.349.165,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					74500 Dokumen	74500 Dokumen	51.290.000,00	27.271.696,00	27.271.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			51.290.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					10 Layanan	10 Layanan	29.600.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			29.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					52963 Dokumen	52963 Dokumen	332.956.000,00	927.750.608,00	1.021.750.608,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			391.901.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					40 Dokumen	40 Dokumen	28.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			53.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					10 Dokumen	10 Dokumen	247.580.000,00	2.001.063.808,00	2.001.063.808,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			288.580.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					3 Laporan	3 Laporan	45.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
J U M L A H													49.453.277.671,00	58.458.848.684,00	48.407.697.230,40						49.366.276.755,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Pangkalpinang serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari Anggaran APBD Perubahan Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, maka penerapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran Tujuan dan Sasaran instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Pangkalpinang, Mei 2025

KEPALA BADAN KEUANG DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG

DR. MUHAMMAD YASIN, S.E, M.M
PEMBINA TK 1 / IV B
NIP. 197311222002121006